

RENCANA KERJA
SATUAN BANTUAN TEKNIS T.A. 2024

I. LATAR BELAKANG

1. Kondisi Umum

Tahun 2024 merupakan tahun Ke-5 (lima) dari Tahapan Rencana Strategis Polri 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polri T.A. 2024 sehingga dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polri T.A. 2024. Rencana Kerja Polri T.A. 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Polri 2020-2024. Rencana Kerja Polri T.A. 2024 disusun dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024, yaitu: (1) pilar keamanan dalam negeri; (2) pilar pertahanan; (3) pilar keamanan laut; (4) pilar keamanan dan ketertiban masyarakat; dan (5) pilar keamanan Siber diperlukan "Safe Guarding" penuntasan target prioritas nasional RPJMN 2020-2024 mengingat tahun 2024 adalah tahun politik, agenda Pemilu dan masa transisi serta dimulainya pemikiran RPJMN sebagai kelanjutan dari *roadmaps* VISI 2045.

Satuan Bantek merupakan salah satu unsur pelaksana pada Pasukan Gegana Korbrimob yang bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan Detasemen detasemen dalam lingkungan Satuan Bantek serta meningkatkan kemampuan personel dan mengerahkan kekuatan satuan atas perintah komandan Pasukan Gegana dengan menyelenggarakan fungsi sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif dan perlawanan teror serta pemberian bantuan teknis fungsi Gegana pada kegiatan yang berskala nasional maupun internasional.

Satuan Bantek terus berusaha mewujudkan postur Polri yang Prediktif, Reponsibilitas dan Transparansi Berkeadilan (Presisi) baik dibidang pembinaan maupun operasional. Di bidang pembinaan, Satuan Bantek melaksanakan latihan pemeliharaan kemampuan bagi personel Satuan Bantek dan Detasemen Bantist di satuan Brimob Polda secara terencana dan terprogram setiap tahunnya baik di lingkungan Satuan Bantek maupun dengan instansi lain. Upaya peningkatan kemampuan personel dilakukan pula dengan menjalin kerjasama dalam bentuk latihan bersama dengan kepolisian berbagai Negara seperti Negara Prancis (RAID) dan GSG 9 dari kepolisian Jerman hal itu sebagai upaya meningkatkan kemampuan personel untuk mewujudkan postur Polri yang profesional. Di bidang operasional, Pasukan Gegana Korbrimob berperan aktif dalam pengerahan dan penggelaran kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi yang ditimbulkan akibat terjadinya konflik sosial maupun komunal di beberapa daerah dengan melakukan tindakan Kepolisian terhadap gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua serta berpartisipasi aktif dalam beberapa kegiatan berskala nasional maupun internasional, seperti KTT Asean di Bali maupun Labuan Bajo NTT, APEC, Sail Raja Ampat, UNAOC dan Bali Democracy Forum (BDF) serta memelihara ketertiban dunia dengan mengirimkan setiap tahunnya personel yang tergabung dalam misi perdamaian dunia yang telah dilaksanakan dengan sukses dan mendapat apresiasi dari dunia internasional. Adapun dalam rangka pengamanan agenda dan kalender nasional, Satuan Bantek selalu berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya yang tergabung dalam Operasi Kendali Terpusat yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

Satuan Bantek selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan berskala internasional terkait dalam hal menjaga ketertiban dunia dengan setiap tahunnya mengirimkan personel yang tergabung dalam misi perdamaian dunia (IPO Unmiss di sudan selatan, Minusca 3 dan 4 di Afrika tengah) yang telah dilaksanakan dengan sukses dan mendapat apresiasi dari dunia internasional. Adapun dalam rangka pengamanan agenda dan kalender nasional, Satuan Bantek selalu berperan aktif dalam melaksanakan

Lingkungan strategis, baik global, regional dan nasional sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi oleh Satuan Bantek. Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, dimana dunia menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat. Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai yang saling mempengaruhi dan budaya bangsa yang positif berpotensi bisa berubah menjadi perilaku negatif seperti: eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme dan radikalisme.

Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia serta berkembangnya *Covid-19* dengan berbagai varian dari suatu negara ke negara lain sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban. Selanjutnya perkembangan lingkungan strategi nasional harus dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah di setiap saat. Semua isu strategis baik global, regional dan nasional tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Bantek T.A. 2024.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Satuan Bantek yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Aspek Kehidupan

1) Global

Perkembangan lingkungan strategis global yang senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu seperti penyebaran *Covid-19* dan vaksinya, isu hak asasi manusia, krisis ekonomi, radikalisme dan terorisme, siber dan kejahatan lintas negara. Perubahan lingkungan strategis global secara spesifik dapat dilihat sebagai berikut:

- a) wabah Covid-19 telah merubah tatanan dunia termasuk Indonesia secara cepat, dan tidak terprediksi, yang berdampak pada kesehatan, sosial dan ekonomi serta keamanan. Tatanan sosial, perilaku dan gaya hidup masyarakat mengalami perubahan signifikan, yang menyebabkan adanya disrupsi inovasi teknologi, perubahan norma dan perilaku pola sukarela dan terpaksa tidak terelakkan dan tidak dapat kembali kepada keadaan semula;
- b) embargo dan sanksi ekonomi kepada Rusia setelah presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer secara resmi pada Kamis tanggal 24 Februari 2022 terhadap negara Ukraina, namun peperangan masih berlangsung sampai dengan saat ini yang berdampak pada terjadinya krisis ekonomi (pangan, komoditas dan moneter) dan energi secara global, dampak perang berikutnya adalah terputusnya impor komoditas dari Ukraina ke beberapa negara dan ini membuat terjadinya krisis komoditas pangan yang diimpor dari Ukraina ke beberapa negara Eropa termasuk Indonesia yang mengimpor gandum;
- c) adanya ancaman resesi ekonomi. Direktur pelaksana IMF, Georgieve, mengatakan bahwa ekonomi dunia pada tahun 2023 akan “gelap” karena akan menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan, IMF menegaskan prospek ekonomi “gelap Gulita” mengingat guncangan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina dan perubahan iklim di seluruh dunia;
- d) hubungan Amerika Serikat (AS) dengan negara-negara eksportir minyak dan sekutunya yang tergabung dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC memanas. Pasalnya, di tengah ancaman krisis energi global, kartel tersebut justru mengumumkan pengurangan pasokan minyak. Pemerintah Arab Saudi membela keputusan Organisasi Negara-Negara

Pengekspor Minyak plus mitra/OPEC terkait pemangkasan produksi minyak;

- e) konflik lahan, sumber daya alam dan energi untuk memenuhi kebutuhan energi dan bahan baku industri, masih akan terus berlangsung seiring dengan pemulihan ekonomi dan akselerasi ketegangan Tiongkok dan Amerika Serikat;
- f) isu climate change adalah tantangan yang muncul akibat perubahan iklim adalah bahwa Indonesia mementingkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang tetap memperhatikan aspek lingkungan. Indonesia telah melakukan transisi energi dengan berbagai upaya mulai dari co-firing PLTU dengan blue ammonia, carbon capture and storage, serta financial model untuk untuk PLTU yang tidak efisien. Hal tersebut juga terkait dengan target untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Transisi energi harus berkeadilan, berkelanjutan dan affordable bagi masyarakat. Indonesia mendesak negara-negara maju untuk memenuhi janji mereka untuk menyediakan pendanaan untuk penanganan perubahan iklim sebesar USD100 miliar kepada negara-negara berkembang;
- g) kelangkaan lahan, kelangkaan pangan, kelangkaan sumber energi, kelangkaan air bersih dan udara bersih akan mengancam keamanan manusia. Hal ini diperparah dengan adanya perubahan iklim yang menyebabkan terganggunya ketahanan dan kemampuan beradaptasi manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga secara signifikan akan mempengaruhi dinamika politik, perekonomian, adanya krisis air dan pangan, munculnya berbagai penyakit pandemik, migrasi penduduk dan konflik sosial;
- h) kejahatan Cyber di era globalisasi, informasi menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan

informasi telah menjadi penghasil uang yang dapat menggantikan tambang emas, minyak bumi, dan batubara. Informasi tidak saja mampu mengubah perilaku pribadi masyarakat, tetapi juga mengubah struktur sosial dalam berbagai bentuk dengan bantuan rekayasa sosial. Informasi tidak saja menjadi modal sosial, tetapi juga begitu bernilai jual, sehingga akan menambah nilai terhadap apapun yang melekat terhadap informasi;

- i) kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) pada umumnya bersifat lintas negara, mengingat produsen, kurir, dan korban bisa berasal dari negara yang berbedabeda. Untuk itu, diperlukan kerja sama internasional karena tidak dapat ditanggulangi oleh satu negara sendiri. Mengingat kondisi geografis dan demografis, Indonesia telah menjadi salah satu negara tujuan dari peredaran narkotika. Indonesia telah menempatkan kejahatan narkoba sebagai high-risk crime dan dalam penanganannya membutuhkan upaya yang luar biasa (extra ordinary). Untuk itu Indonesia mendorong kerja sama internasional untuk meningkatkan upaya penanggulangan isu narkoba. Saat ini terdapat 3 (tiga) Konvensi anti Narkoba, yang semuanya juga telah diratifikasi oleh Indonesia;
- j) kejahatan Lintas Negara Baru dan Berkembang (New and Emerging Crimes), antara lain cybercrime, identity-related crimes, perdagangan gelap benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan di atas laut, dan perdagangan gelap organ tubuh. Kejahatan Lintas Negara Baru telah menjadi perhatian dari dunia internasional mengingat jumlahnya yang semakin meningkat dan cara yang semakin beragam. Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan jenis ini juga sangat besar;
- k) isu diskriminasi muslim Uyghur di Cina, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menolak usulan Amerika Serikat (AS)

untuk menggelar debat tentang kondisi muslim Uyghur di Xinjiang. Politisasi kondisi muslim Uyghur di Xinjiang, misalnya narasi bahwa umat Islam di sana di zalimi oleh Pemerintah Cina berpengaruh pada bagaimana pandangan umat Islam terhadap segala hal yang berkaitan dengan Cina, termasuk di Indonesia. Ancaman kekerasan dan teror di Indonesia terhadap yang berkaitan dengan Cina dipengaruhi oleh isu-isu kesenjangan sosial ekonomi, kasus penistaan agama, investasi Cina dan komunis, politisasi Xinjiang dan konspirasi (asal virus) Corona;

- I) Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar dalam menjaga wilayahnya dan menegakkan kedaulatan termasuk terhadap kejahatan perikanan. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintahan Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan memajukan kerjasama maritim melalui diplomasi serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim guna mengamankan sumber daya alam kelautan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kerja sama penanggulangan kejahatan perikanan akan mendukung strategi Pemerintah RI dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim, yaitu mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian kejahatan perikanan serta kegiatan lain yang merusak laut;

2) Regional

Perkembangan lingkungan strategis regional secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi Indonesia. Lingkungan strategis regional saat ini dipengaruhi beberapa isu, yaitu: konflik politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, sengketa perbatasan negara baik perbatasan darat, laut, dan udara, kerja sama antara negara ASEAN di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan. Isu-isu strategis tersebut secara spesifik adalah sebagai berikut:

peran kunci dalam pembangunan sosial ekonomi regional ASEAN yang berkelanjutan di tengah ancaman eksternal seperti penyakit epidemi, perubahan iklim, dan masalah geopolitik. Memperkuat kerja sama lingkungan regional dengan semua pemangku kepentingan merupakan upaya untuk menghadapi tantangan tersebut. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Kamboja, Tin Ponlok, saat membuka pertemuan ASEAN Senior Officials on Environment (ASOEN) ke-33, pada 5 Oktober 2022, Siem Reap, Kamboja;

3) Nasional

a) Geografis

- (1) letak geografis Indonesia yang strategis selalu menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Selain itu, Indonesia juga menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, terutama perdagangan antara negara-negara industri dan negaranegara yang sedang berkembang, menjadi titik persilangan perdagangan antara Jepang, Korea, RRC dengan negaranegara di Afrika, Australia dan Eropa;
- (2) Indonesia memiliki 4 chokepoint dari 10 chokepoint di dunia alur pelayaran utama internasional, yang dilalui oleh berbagai kapal niaga dan kapal-kapal lainnya. Dari 10 chokepoint di dunia, empat di antaranya ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Titik-titik strategis ini dilalui oleh 40% kapal-kapal asing, karena merupakan jalur utama perdagangan internasional;
- (3) beragamnya kebudayaan, agama, bahasa, dan seni di Indonesia dipengaruhi oleh orang-orang asing dari berbagai bangsa yang masuk ke Indonesia melalui kegiatan berdagang dan berlayar, mereka juga menyebarkan kebudayaan dan agama di Indonesia;

(4) Letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudera serta dilintasi oleh garis katulistiwa menyebabkan Indonesia dilalui oleh angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat bergerak dari Benua Asia kemudian melewati Samudera Hindia menuju ke Benua Australia. Angin muson barat ini membawa uap air dalam jumlah besar sehingga menyebabkan terjadi musim hujan dan cuaca ekstrem akibat pemanasan global;

b) Demografi

(1) Indonesia memiliki luas daratan mencapai 1.919.440 km² yang terbagi dalam 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Berdasarkan sensus 2020, Indonesia memiliki jumlah penduduk 270.203.917 jiwa dengan komposisi laki-laki 136.661.899 (50,6%) dan perempuan 133.542.018 (49,4%);

(2) jumlah usia produktif (15-64 tahun) adalah 191,08 juta dengan komposisi generasi x (40-55 tahun) berjumlah 58,65 (21,88%) juta, generasi z (8-23 tahun) berjumlah 74,93 (27,94%) juta dan generasi milenial (24-39 tahun) berjumlah 69,38 juta atau 25,87% sementara jumlah lansia 5,03 juta atau 9,82%;

(3) distribusi penduduk tidak merata dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan penduduk yang mendiami Pulau Jawa mencapai 151,59 juta jiwa atau 56,10 persen penduduk Indonesia. Untuk Pulau Sumatera mencapai 21,68%, Pulau Sulawesi 7,36%, Pulau Kalimantan 6,15%, Bali dan Nusa Tenggara 5,54%, serta Papua 3,17%. Tingkat kepadatan penduduk Indonesia adalah 141 jiwa per km. Laju pertumbuhan penduduk 2020 yaitu 1,25% dan melambat dari periode sebelumnya 1,49%;

c) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam Indonesia tersebar secara tidak merata di seluruh Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia digolongkan menjadi 2, yaitu persebaran sumber daya alam

hayati dan persebaran sumber daya alam barang tambang. Sumber daya alam hayati terdiri dari sumber daya alam hewani dan nabati;

- (1) sumber daya alam nabati. Indonesia dianugrahi tanah yang subur, sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan sempurna di wilayah Indonesia. Wilayah flora di Indonesia meliputi hutan tropis, hutan musim, stepa dan sabana;
- (2) sumber daya alam hewani. Pada umumnya wilayah persebaran fauna di Indonesia dibagi 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Ketiganya dibatasi oleh Wallace dan garis Weber. Bagian barat lebih cenderung mengikuti ragam hewan Asia, sedangkan bagian timur mengikuti ragam hewan Australia. Ciri-ciri kasus hewan Indonesia terdapat pada wilayah bagian tengah;
- (3) sebaran Hasil Tambang, Kekayaan tambang Indonesia tersebar secara tidak merata diseluruh indonesia;

d) Ideologi

- (1) pekerja Migran Indonesia (PMI) rentan terpapar terorisme karena mereka minim pengetahuan terkait bahaya radikal terorisme. Terbukti di sejumlah negara seperti di Singapura dan Hong Kong ada pekerja migran yang terpapar terorisme. Rentan-nya pekerja migran juga disebabkan adanya Foreign Terrorist Fighters (FTF) Indonesia termasuk di zona konflik Irak dan Siria. Kelompok tersebut menyebarkan paham terorisme melalui berbagai cara seperti lewat media sosial Kelompok teroris ini kerap menggunakan narasi agama sebagai landasan untuk bersikap intoleran, eksklusif bahkan melakukan kekerasan;
- (2) ideologi Papua Merdeka berkembang dari persoalan dan aspirasi dari kelompok masyarakat Papua yang putus asa

terhadap kebijakan pemerintah Pusat yang tertinggal dari Provinsi lainnya, sejak bergabung dengan pemerintah RI;

- (3) adanya Pengibaran Bendera Bintang kejora Papua, Bendera RMS dan Bulan Sabit di Aceh pada moment tertentu khususnya pada peringatan HUT berdirinya kelompok separatis tersebut mengindikasi kuatnya ideologi kelompok;
- (4) kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang didukung oleh para politisi tertentu telah mewacanakan dan mengusung ideologi selain ideologi Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Wacana tersebut disuarakan dengan mengangkat sistem pemerintahan yang menganut Khilafah, sistem NKRI bersyariah dan isu kebangkitan komunis/PKI gaya baru. Wacana dan isu tersebut menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat;
- (5) kelompok yang mewacanakan dan mengusung ideologi selain ideologi Pancasila antara lain ex FPI, PA 212, GNPF Ulama, eks Ormas HTI yang telah dibubarkan oleh pemerintah dan para pendukungnya;
- (6) pasca reformasi muncul radikalisasi ideologi Islam yang menghadirkan aksi-aksi teror yang berjaringan secara internasional. Jaringan yang pernah ada seperti JAD, JAT, eks HTI, Khilafatul Muslimin secara terang-terangan atau diam-diam jaringan ini selalu bergerak dan mencari peluang;

e) Politik

- (1) tingkat Kepercayaan Publik kepada pemerintah; Pada bulan Juni 2022 kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menurun. Hal tersebut dipicu karena beberapa harga pangan, bahan bakar yang naik dan beberapa bantuan yang tidak tepat sasaran dikarenakan data dari Kemensos RI tidak akurat. Hal tersebut menyebabkan 31% masyarakat Indonesia yang tidak mempercayai pemerintahan saat ini dan

menjadi mata pisau yang menyebabkan situasi Kamtibmas yang tidak kondusif yang dimanfaatkan oleh kelompok oposisi pemerintah untuk menyerang kebijakan pemerintahan saat ini;

- (2) Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara telah disahkan UU IKN oleh pemerintah menuai Pro Kontra Parpol dan Isu Penolakan dan Gugatan ke Mahkamah Kontitusi (MK), 9 (sembilan) Fraksi di DPR RI, 8 Menerima dan 1 Menolak (PKS). Elemen yang menolak Waka DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi YLBHI bersama 17 Kantor LBH seluruh Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia, Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur, Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan Keberadaan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Potensi Kerawanan IKN:

- (a) permasalahan lahan;
 - (b) dinamika politik nasional (dampak pro kontra intervensi internasional (Isu HAM, LH, masyarakat adat, dan lain-lain);
 - (c) konflik antar etnis dan sub etnis;
 - (d) tumpang tindih perizinan pengelolaan SDA dan Mineral;
- (3) isu Krusial pasal-pasal RKUHP

Draf RUU PAS tidak mengalami perubahan apapun dari draf untuk mendapatkan persetujuan tingkat II (paripurna), ada penyempurnaan yang meliputi tujuh hal terkait 14 isu krusial yang terkait ancaman pidana, bab tindak pidana penadahan, penerbitan dan percetakan, harmonisasi dengan UU di luar KUHP, sinkronisasi batang tubuh dan penjelasan, teknik penyusunan, dan tipo;

Tim pembahasan RKUHP dan RUU PAS telah mengkaji dan menyesuaikan isu krusial KUHP berupa the living law atau hukum pidana adat, pidana mati, penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, menyatakan diri dapat melakukan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib, unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih, tindak pidana contempt of court, serta penodaan agama.

(4) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua

Tiga daerah otonom baru (DOB), yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, merupakan implikasi dari Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pemekaran ketiga daerah itu tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena sejak 2014 pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran ataupun penggabungan wilayah.

(5) Pembentukan tiga DOB di Papua itu akhirnya tidak perlu memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur dalam UU Pemda, di antaranya didahului dengan membentuk daerah persiapan provinsi selama tiga tahun. Cakupan wilayah paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi pun bisa diabaikan, seperti yang terjadi pada Provinsi Papua Selatan. Provinsi yang beribu kota di Merauke itu hanya terdiri atas empat kabupaten, yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat;

(6) Tantangan yang dihadapi oleh tiga DOB di Papua cenderung lebih berat dibandingkan DOB lain, diperlukan pengawasan dan pembinaan dari Kemendagri terhadap ketiga DOB di Papua tersebut. Jangan sampai tiga provinsi baru di Papua tidak berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Kehadiran provinsi baru tersebut harus mampu

menyelesaikan masalah-masalah pemerataan pembangunan serta konflik di Papua;

(7) Penolakan Otsus Jilid II aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen Papua berakhir Rusuh pada Selasa, 15 Maret 2022 di Kabupaten Yakuimo dengan Kerugian 2 Meninggal dunia dan 3 luka (Pengunjuk Rasa), korban Polri 2 anggota Luka dan Pembakaran Kantor Kominfo, Ruko dan Rumah Warga di Distrik Deka;

(8) Isu Penundaan Pemilu;

Pada tanggal 24 Januari 2022 Kesepakatan Komisi II, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP Pemungutan Suara Pemilu 2024 dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada tanggal 27 November 2022, gagasan penundaan pemilu datang dari Ketua Umum PKB, Ketua Umum PAN dan Ketua Umum Golkar sedangkan yang menolak dari 6 Parpol, Ormas dan BEM serta elemen masyarakat lainnya melakukan aksi unjuk rasa di berbagai daerah terkait dengan berbagai polemik yang terjadi;

(9) Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2024;

Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 mempedomani UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

(10) Permasalahan Pemilu 2024. Potensi permasalahan Pemilu 2024 sangat erat hubungannya dengan aspek ekonomi, kebijakan pemerintah (politik) dan elektabilitas pemerintahan yang menyebabkan kepercayaan publik akan naik maupun menurun. Dalam banyak studi tentang krisis di berbagai negara ada dua aspek yang tidak bisa dipisahkan yaitu krisis ekonomi yang berujung pada krisis politik. Sebagai contoh Srilanka, yang saat ini mengalami resesi ekonomi yang menyebabkan inflasi dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok yang terus naik,

hal tersebut berujung pada krisis politik sehingga berpengaruh sekali pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden dan pemerintah yang sebabkan kerusuhan dan unjuk rasa besar-besaran;

(11) Pemekaran Papua Barat Daya. Pada tanggal 17 November 2022, dalam rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibentuk dengan berbagai tujuan dan diharapkan kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Barat. Pemekaran juga bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat.

f) Ekonomi

(1) Moneter

(a) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Oktober 2022 telah memutuskan untuk menaikkan *BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)* sebesar 50 bps menjadi 4,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 50 bps menjadi 4,00%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 50 bps menjadi 5,50%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah *front loaded, pre-emptive*, dan *forward looking* untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini terlalu tinggi (*overshooting*) dan memastikan inflasi intike depan kembali ke dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ lebih awal yaitu ke paruh pertama 2023;

(b) Dana Moneter Internasional/*International Monetary Fund (IMF)* mempertahankan proyeksi ekonomi Indonesia untuk

- (ii) pihak yang berseberangan dengan pemerintah;
- (iii) Pengusaha dan/atau pemilik modal yang menentang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi (kenaikan tarif cukai, perluasan barang kena cukai;

(3) Kehutanan dan Lingkungan Hidup

(a) Laju deforestasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) mencatat, hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2019 menunjukkan luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia sebesar 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan. Dari jumlah tersebut, 92,3% dari total luas berhutan atau 86,9 juta ha, berada di dalam kawasan hutan. Dengan memperhatikan hasil pemantauan tahun 2018 dan 2019, dapat dilihat bahwa secara netto deforestasi Indonesia tahun 2018-2019 terjadi kenaikan sebesar 5,2%. Namun demikian untuk deforestasi bruto terjadi penurunan sebesar 5,6%.

Hal ini menunjukkan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah mulai menuai hasil yang signifikan. Berbagai upaya tersebut antara lain penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Kerusakan Gambut, Pengendalian Perubahan Iklim, Pembatasan perubahan Alokasi Kawasan Hutan untuk sektor non kehutanan (Hutan Produksi Konversi/HPK), Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA), Pengelolaan Hutan Lestari, Perhutanan Sosial, serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

(b) Karhutla

Luas Kebakaran Hutan dan Lahan dihitung berdasarkan analisis citra satelite landsat 8 OLI/TIRS yang di overlay dengan data sebaran hotspot, serta laporan hasil groundchek hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni. Data input sampai dengan September 2022. Berdasarkan data Direktorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, jumlah hotspot (titik panas) di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Luas areal atau kawasan hutan dan lahan yang terbakar juga mengalami penurunan.

Titik panas pada 2015 terdapat 70.971, turun 20,4 persen dari 89.214 pada 2014. Meski sempat kembali mengalami kenaikan pada 2018 dan 2019, jumlahnya masih jauh di bawah 2014 yakni 9.245 (2018) dan 29.341 (2019). Jumlah titik panas pun kembali menurun dengan signifikan menjadi 2.568 pada 2020, kemudian 1.451 pada 2021, dan 1.245 pada 2022.

Mengenai luas Karhutla pada 2015 tercatat 2,6 juta hektar. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, luas kebakaran hutan dan lahan terus berada jauh di bawah angka tersebut. Luas kebakaran hutan dan lahan pada 2016 adalah 438.363 hektar. Kemudian 165.484 hektar pada 2017, 510.564 hektar pada 2018, 1.649.258 hektar pada 2019, 296.942 hektar pada 2020, 358.864 hektar pada 2021, dan 183.743 hektar pada Januari sampai September 2022. Kalau dibandingkan head to head dari Januari sampai September 2021 dengan 2022, ini terjadi penurunan sekitar 20 persen.

- (4) Penyelundupan BBL keluar negeri dan penangkapan BBL oleh nelayan saat ini masih marak. Musim penangkapan BBL tahun ini pada bulan Februarisampai dengan Oktober, bulan November sampai bulan Januari cuaca buruk gelombang

oleh Inflasi masih akan cukup tinggi oleh karena itu sport kebijakan moneter dari negara-negara Amerika negara maju lain termasuk eropa masih akan cukup tinggi, cukup ketat untuk bisa mengendalikan inflasi hingga resiko dari pelemahan ekonomi masih sangat nyata. Krisis pangan belum selesai dan IMF menyebutkan lebih sulit karena berhubungan dengan pangan, pupuk sampai tahun 2023 menjadi pertaruhan. Krisis energi juga masih nyata dan tidak pasti.

g) Sosial Budaya

(1) Media Sosial (Isu menonjol Tahun 2023). Perkembangan percakapan publik yang menonjol di media sosial selama bulan Januari s/d Juni 2023. Percakapan terkait konten radikal berjumlah 1.717.232 unggahan dan 461.087 akun terjadi lonjakan ekspos perbincangan yang cukup signifikan di bulan Juni. Hal ini dikarenakan menguatnya isu penistaan agama, yang banyak mendapat tanggapan reaktif dari kelompok Islam konservatif. Twitter menjadi platform utama yang digunakan netizen. Kemudahan dalam membuat trending topik, hingga perang wacana membuat platform ini masih menjadi favorit. Meski demikian, perlu diwaspadai dinamika netizen Facebook dan Tiktok yang cukup organik;

(2) Kesehatan

(a) Permenkes yang dinilai kontroversi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinis. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), David Perdanakusumah menunjuk poin-poin yang kontroversial;

(i) penurunan kualitas pelayanan kesehatan, berpotensi memicu terjadi kekacauan dalam pelayanan kesehatan bisa berdampak jangka panjang terhadap masyarakat luas;

- (ii) ibu hamil dan pasien sejumlah penyakit sulit melakukan *Ultrasonografi/USG* (kematian pasien secara umum, David mengkhawatirkan potensi kematian ibu dan anak. Penyebabnya, karena layanan *USG* oleh dokter kebidanan tidak bisa lagi dilakukan);

- (b) pengawasan produk obat dan makan

Badan POM RI telah melakukan re-evaluasi keamanan dan manfaat tersebut dengan memperhatikan hasil studi terbaru dari data keamanan penggunaan vaksin Dengvaxia di Indonesia dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh WHO serta rekomendasi IDAI. Hasil re-evaluasi menunjukkan bahwa pemberian vaksin Dengvaxia pada individu yang belum pernah terinfeksi virus dengue sebelumnya (seronegatif) dapat menyebabkan demam berdarah dengue berat dan peningkatan risiko rawat inap yang lebih tinggi, dibandingkan dengan individu seronegatif yang tidak diberikan vaksin (plasebo). Selain itu, pada anak usia ≥ 9 tahun, khasiat vaksin pada individu seronegatif lebih kecil dibandingkan individu yang sudah pernah terinfeksi dengue. Vaksin Dengvaxia memberikan khasiat baik pada individu yang sudah pernah terinfeksi virus dengue sebelumnya (seropositif) dengan usia 9-16 tahun;

- (3) konflik antar umat beragama

Pokok permasalahan konflik antar umat beragama antara lain pro kontra pendirian tempat ibadah, di mana sesuai dengan SKB 2 Menteri yang pro tetap diberlakukan dan ditetapkan sebagai UU, namun yang Kontra agar SKB 2 Menteri tersebut dicabut atau direvisi sebagian dari butir isinya:

- (a) sering terjadinya aksi protes yang berakhir dengan tindakan anarkis dalam pendirian tempat ibadah panitia pembangunan tempat ibadah tersebut tidak

dilakukan sosialisasi dan silaturahmi terhadap para tokoh agama dan tokoh masyarakat disekitar lokasi pembangunan tempat ibadah sehingga menimbulkan kesan tidak dihargai;

- (b) panitia pembangunan tempat ibadah tersebut tidak melengkapi persyaratan pendirian tempat ibadah sesuai dengan ketentuan;
- (c) panitia tidak melengkapi persyaratan IMB terlebih dahulu melainkan membangun dulu baru mengurus IMB;
- (d) adanya konflik intern dalam suatu agama yang akhirnya dapat berkembang menjadi konflik terkait masalah pendirian tempat ibadah;
- (e) ketidak tegasan para kepala daerah dalam menyikapi masalah pendirian tempat ibadah;

(4) Konflik internal umat beragama

Konflik intern agama yang terjadi di Indonesiadisebabkan adanya perbedaan khilafiah dalam menafsirkan dan memahami teks Al-Quran dan Hadistyang diikuti adanya perbedaan amaliah yang akhirnya masing-masing kelompok mengklaim bahwa kelompoknya merasa yang paling benar dan menghakimi pihak lain yangtidak sepaham sebagai kelompok yang sesat, bid'ah, musyrik, murtad dan kafir sehingga menimbulkan keresahan dan perpecahan di dalam masyarakat muslim yang berakibat terjadinya konflik internal bernuansa agama yang mengganggu stabilitas Kamtibmas;

- (5) penyelenggaraan haji dan permasalahan haji di Indonesia Dengan dibukanya kembali jemaah haji dari luar Arab Saudi diharapkan kesempatan berangkat haji umat Islam terbuka kembali setelah 2 tahun vakum karena pandemi. Kini umat Islam yang sudah masuk kuota keberangkatan haji selama pandemi berharap-harap bisa masuk dalam kategori yang disyaratkan Kerajaan Arab Saudi. Sedangkan Kemenag

tahun terakhir, teroris yang ditangkap menunjukkan tren peningkatan. Pada 2020 misalnya, ada 232 teroris yang ditangkap. Sementara pada tahun lalu terdapat 370 teroris yang ditangkap sepanjang tahun. Densus 88 Sudah Bertindak Sesuai SOP Saat Tindak Teroris di Sukoharjo, dengan upaya pencegahan yang dilakukan Densus 88, angka kejadian terorisme turun dari 13 kejadian pada 2020 menjadi 6 kejadian pada 2021, meski jumlah teroris yang ditangkap bertambah. Pada tahun 2021 itu penangkapan itu menurunkan tingkat *attack* atau kejadian terorisme. Namun, dengan penangkapan begitu banyak, itu berindikasi bahwa terorisme itu masih ada. ancaman terorisme juga masih eksis setelah adanya pergantian pemimpin ISIS di Suriah. Pimpinan ISIS masih mengendalikan jaringan-jaringan di Indonesia. Hal itu terbukti ketika Densus menangkap sejumlah orang yang terlibat dengan media ISIS. Mereka diperintahkan untuk menduplikasi propaganda-propaganda mereka yang tadinya dalam bahasa Arab kemudian ditranslate ke dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris lalu disebar lagi ke media sosial, Densus 88 Ungkap Video Dokter tersangka Teroris di Sukoharjo yang coba melarikan diri artinya secara ideologi, secara spirit, mereka masih tetap ada. Walaupun di Timur Tengah mereka kehilangan teritori, tapi dengan hadirnya pemimpin baru, artinya ada napas atau angin segar buat mereka untuk kembali.

- (3) Kasus penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan hasutan bernuansa SARA yang bertujuan memecah belah masyarakat masih terjadi dan cenderung meningkat di beberapa kota besar salah satunya DKI Jakarta. Mengingat beberapa kepala daerah akan habis masa jabatannya di tahun 2022 dan beberapa kepala daerah berpotensi diusung menjadi peserta kontestasi pemilihan Presiden tahun 2024. Politisasi agama

berpotensi menjadi trend kembali sebagai strategi peningkatan elektabilitas hingga proses *black campaign*;

(4) *Cyber crime*

Kasus penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan hasutan bernuansa SARA yang bertujuan memecah belah masyarakat masih terjadi dan cenderung meningkat di beberapa kota besar salah satunya DKI Jakarta. Mengingat beberapa kepala daerah akan habis masa jabatannya di tahun 2022 dan beberapa kepala daerah berpotensi diusung menjadi peserta kontestasi pemilihan Presiden tahun 2024. Politisasi agama berpotensi menjadi trend kembali sebagai strategi peningkatan elektabilitas hingga proses *black campaign*;

b. Analisis

Pelaksanaan tugas Satuan Bantek Pasukan Gegana dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari faktor internal dan eksternal sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisa agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi. Satuan Bantek Pasukan Gegana memiliki 2 (dua) Detasemen yaitu Detasemen Pengembangan, Detasemen Bantuan Taktis dan Satuan Bantek didukung dengan sarana dan prasarana yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Bantek Pasukan Gegana dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat dan dampak akibat pengaruh perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber). Masih dijumpai adanya kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakan dan kepastian hukum. *Trend* peningkatan 4 jenis kejahatan yaitu kejahatan kelompok radikal, jaringan terorisme, kelompok kriminal bersenjata, konflik sosial dan kejahatan insurjensi, menuntut Satuan Bantek Pasukan Gegana

untuk lebih maksimal dalam penyiapan operasional sebagai penegakan hukum. Sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih terkait kewenangan antar lembaga penegak hukum menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum di Indonesia. Semakin meningkatnya kejahatan transnasional terkait dengan semakin tidak jelasnya batas negara sehingga lalu lintas orang dan barang ilegal semakin mudah dan cepat untuk dilakukan, adapun analisa SWOT sebagai berikut :

1) Kekuatan (***Strength***)

- a) Satuan Bantek Pasukan Gegana memiliki 2 Detasemen terdiri dari 1 Detasemen Pengembangan dan Detasemen Bantuan Taktis. Adapun kekuatan Satuan Bantek Pasukan Gegana dan PNS Polri sejumlah 181 orang personel terdiri dari 186 orang anggota Polri dan 3 orang PNS;
- b) sebagai *Power On Hand* Komandan Pasukan Gegana, Satuan Bantek menyiagakan 1 Unit yang siap digerakkan 1 X 24 Jam guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas dan berkadar tinggi serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- c) dengan semangat jiwa korsa, disiplin, loyalitas, dedikasi dan patuh hukum yang sudah tertanam di jiwa masing-masing personel Satuan Bantek Pasukan Gegana menjadi modal dasar dalam setiap pelaksanaan tugas;
- d) dukungan Almatsus dan Alpalkam serta sarana dan prasana Satuan Bantek Pasukan Gegana semakin meningkat dari tahun ke tahun guna mendukung tugas operasional Pasukan Gegana dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan tuntas;

- e) pengelolaan anggaran di lingkungan Satuan Bantek Pasukan Gegana yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan kegiatan dan anggaran untuk program yang lebih prioritas dan berkualitas dalam pencapaian kinerja Satker telah mendorong iklim kerja yang positif;
 - f) kemampuan dan keterampilan perorangan maupun Detasemen Satuan Bantek Pasukan Gegana yang telah dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri cukup mumpuni sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan peranan Satuan Bantek Pasukan Gegana guna mewujudkan Postur Polri yang profesional, modern dan terpercaya;
 - g) adanya tunjangan kinerja / remunerasi kepada personel Polri telah memberikan dorongan, semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.
 - h) latihan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan diharapkan dapat memelihara kemampuan yang dimiliki Satuan Bantek Pasukan Gegana.
- 2) Kelemahan (***Weaknesses***)
- a) piranti lunak yang sudah tidak relevan lagi dengan pelaksanaan tugas Satuan Bantek sehingga perlu dilaksanakan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini dan disosialisasikan secara menyeluruh kepada personel Satuan Bantek Pasukan Gegana;
 - b) tingkat peremajaan personel yang dilakukan relatif lambat masih kurang jika dibandingkan dengan *intake* yang diterima pada tiap tahunnya oleh karena itu perlunya peningkatan pemenuhan personel sesuai dengan kebutuhan;

- c) beberapa material berupa alat utama / alat khusus yang sudah termakan usia sehingga perlu dilaksanakan pembaharuan dan atau peremajaan;
 - d) penggunaan kekuatan Satuan Bantek dalam rangka menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sering dihadapkan dengan keterbatasan dukungan anggaran operasional dibandingkan kondisi lapangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan operasional (terutama di wilayah Indonesia Timur);
 - e) keterampilan dan kemampuan personel Satuan Bantek Pasukan Gegana masih perlu ditingkatkan terkait tugas dan fungsi Satuan Bantek Pasukan Gegana untuk menghadapi trend kejahatan yang semakin canggih;
 - f) belum memadainya kesejahteraan personel Satuan Bantek Pasukan Gegana untuk mendukung profesionalisme terkait dengan tunjangan kinerja, perumahan dinas, keselamatan kerja (Asuransi) dan sarana prasarana lainnya;
 - g) pembinaan, pengawasan maupun pengendalian personel oleh Komandan Unit di lapangan perlu ditingkatkan secara optimal guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas;
- 3) Peluang (Opportunities)
- a) program Reformasi Birokrasi dalam rangka upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), memberikan peluang bagi Satuan Bantek Pasukan Gegana untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri mencakup aspek Struktural, Instrumental dan aspek kultural;

- b) adanya penambahan personel Perwira, Brigadir, Bhayangkara dan PNS Polri di Pasukan Gegana sebagai upaya penambahan dan peremajaan personel;
 - c) pengembangan kemampuan SDM Satuan Bantek Pasukan Gegana melalui pendidikan pengembangan Spesialis (Dikbangspes) maupun pendidikan pengembangan umum (Dikbangum) diharapkan dapat meningkatkan kompetensi personel yang mampu memberi pertimbangan terhadap kekurangan SDM dari aspek kualitas;
 - d) skala prioritas untuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpalkam dalam mendukung tugas Satuan Bantek Pasukan Gegana yang semakin kompleks;
 - e) terjalinnya hubungan lintas sektoral dengan instansi/lembaga terkait (*Partnership*) baik dalam negeri maupun luar negeri dalam mendukung kebijakan Sinergi Polisional Proaktif guna peningkatan kualitas kemampuan personel Satuan Bantek Pasukan Gegana.
- 4) Ancaman (Treat)
- a) kecenderungan meningkatnya 4 (empat) jenis kejahatan (konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi) serta penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin mengganggu stabilitas dan keamanan nasional, baik secara kualitas maupun kuantitas membawa konsekuensi bagi pelaksanaan tugas Satuan Bantek Pasukan Gegana;
 - b) perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi disamping berdampak positif sebagai hasil pembangunan, serta kecepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Satuan Bantek Pasukan Gegana untuk dapat menyesuaikan perkembangan teknologi informasi yang semakin kompleks;

- c) peningkatan kejahatan yang menggunakan teknologi canggih serta penggunaan media sosial sering digunakan untuk menyebarkan *hoax* dan kebencian sehingga mengganggu stabilitas keamanan nasional;
- d) tingkat kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang masih rendah sehingga pelanggaran hukum dianggap hal biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan bertindak main hakim sendiri;
- e) sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih, sebagai upaya dalam pembaharuan hukum dan perundang-undangan mengakibatkan kerancuan dalam operasionalisasi penegakan hukum di lapangan;
- f) bergesernya motif dari aksi pelaku teror yang sebelumnya menjadikan aset maupun kepentingan negara-negara barat sebagai sasaran terornya, saat ini menjadikan personel Polri maupun instalasinya sebagai sasaran pembalasan.

2. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan tugas Satuan Bantek Pasukan Gegana seiring dengan perkembangan lingkungan strategi global, regional dan nasional semakin berat dan kompleks. Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja Satuan Bantek Satuan Bantek Pasukan Gegana dan pelayanan di bidang Kepolisian oleh Satuan Bantek Pasukan Gegana semakin tinggi mengharuskan Satuan Bantek Pasukan Gegana menyusun berbagai upaya dan aksi konkrit yang efektif dan efisien dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara umum permasalahan yang akan dihadapi Satuan Bantek Pasukan Gegana pada Tahun 2024 di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Internal

- 1) masih kurangnya jumlah personel Satuan Bantek Pasukan Gegana dan satuan jajaran baik Perwira, Brigadir, Bhayangkara dan PNS karena sesuai DSPP sejumlah 655 orang personel namun sampai saat ini baru terpenuhi sejumlah 189 orang personel terdiri dari 181 orang anggota Polri dan 3 orang PNS (baru terpenuhi 32,6 %);
- 2) peningkatan profesionalisme personel Satuan Bantek Pasukan Gegana dari segi kualitas, kuantitas ,kapasitas dengan latihan tersertifikasi maupun pendidikan serta pembinaan karier secara terprogram , berjenjang dan berkelanjutan;
- 3) perlunya peningkatan kesejahteraan personel Satuan Bantek Pasukan Gegana terkait dengan tunjangan kinerja, pemenuhan rumah dinas, kendaraan dinas, pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja (asuransi) secara bertahap dan berkelanjutan;
- 4) semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka trend kejahatanpun mengalami perubahan untuk itu Satuan Bantek Pasukan Gegana harus melakukan penyesuaian khususnya dalam pengadaan Almatasus harus dilakukan upgrade dan modernisasi disesuaikan dengan tuntutan tugas terutama bagi satuan tugas operasional;
- 5) perlunya peningkatan kinerja organisasi Satuan Bantek Pasukan Gegana di era demokratisasi dan keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat lebih mudah mengetahui kinerja Satuan Bantek Pasukan Gegana;
- 6) perlunya pembenahan dan penyempurnaan piranti lunak yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi Satuan Bantek Pasukan Gegana serta peningkatan kinerja organisasi

dengan perubahan *mind set* dan *culture set* menuju kinerja organisasi yang lebih baik;

- 7) penyempurnaan regulasi dan piranti lunak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi dilapangan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional Satuan Bantek Pasukan Gegana;
- 8) kerjasama Satuan Bantek Pasukan Gegana dengan aparat Pemerintah dan instansi lain serta *stakeholders* / pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri masih belum optimal sehingga diperlukan adanya peningkatan kerja sama melalui sinergi polisional dengan membangun kemitraan secara berkelanjutan guna meningkatkan kemampuan personel maupun operasional Satuan Bantek Pasukan Gegana;
- 9) penguatan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan dengan mengefektifkan kegiatan pengawasan pengendalian (*wasdal*) baik di level manajerial maupun di level pelaksana tugas di lapangan dan peningkatan kerja sama dengan *stakeholders* melalui pengawasan eksternal untuk mewujudkan Satuan Bantek Pasukan Gegana yang transparan dan akuntabel serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

b. Eksternal

- 1) wabah *Covid-19* dengan varian baru sampai saat ini masih berada disekitar kita bahkan merupakan ancaman global, hal tersebut turut mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) transformasi digital menjadi pendorong penting dalam respons terhadap pandemi untuk mengantisipasi risiko penularan dan memastikan penerapan jarak fisik (*physical*

distancing), perubahan kebiasaan tersebut akan berpengaruh pada kehidupan sebagian besar masyarakat;

- 3) segregasi (pemisahan) masyarakat berdasarkan SARA akan semakin kuat dengan adanya persiapan kontestasi Pemilu 2024;
- 4) konflik SARA terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki setiap kelompok yang dipengaruhi oleh rendahnya toleransi di masyarakat. Adanya kelompok identitas mengatasnamakan suku maupun golongan tertentu menjadi pemicu munculnya konflik antar etnis / suku, paham politik saat ini juga berperan dalam menciptakan kebencian antar suku/etnis dan umat beragama sehingga memicu timbulnya tindakan kekerasan yang berujung terjadinya konflik SARA;
- 5) transformasi digital dan kesenjangan digital di tengah-tengah masyarakat akan menimbulkan informasi asimetris yang berakibat pada segregasi, konflik dan kekerasan serta pemanfaatan teknologi banyak mengarah pada kejahatan siber seperti *spamming*, *phising* dan *hacking*;
- 6) keberadaan dan kegiatan kelompok teroris di Indonesia masih tumbuh dan berkembang, mereka mengembangkan pola kegiatan dan sasaran secara sporadis termasuk terhadap sasaran aparat keamanan dan pejabat pemerintah;
- 7) rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan masih lemahnya penegakan hukum, menimbulkan kecenderungan mengabaikan aturan undang-undang serta masih tingginya konflik sosial, aksi *sweeping*, premanisme dan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat perlu penanganan secara komprehensif;

- 8) perkembangan teknologi digital yang sangat cepat mengharuskan Satuan Bantek Pasukan Gegana dituntut untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;
- 9) semakin meningkatnya kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda;
- 10) Pengamanan tahapan Pemilu menuju 2024 dan pengamanan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

II. TUJUAN DAN SASARAN.

1. Visi dan Misi

a. Visi

1) Visi Pasukan Gegana

“terwujudnya keamanan dalam negeri dengan penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi serta melayani masyarakat”.

2) Visi Satuan Bantuan Teknis

“Terwujudnya Masyarakat Aman Dan Tertib dengan mendukung penindakan gangguan kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi menuju Indonesia Maju”

b. Misi.

1) Misi Pasukan Gegana

Mewujudkan kehadiran negara di tengah masyarakat melalui tindakan Kepolisian: pre-emptif, preventif, penegakan hukum khususnya terhadap kejahatan terorisme dan kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif dan memberikan bantuan teknis fungsi Gegana secara responsif serta melaksanakan rehabilitasi terhadap kejadian force majeure.

2) Misi Satuan Bantuan Teknis

“Mewujudkan kehadiran negara di tengah masyarakat melalui tindakan Kepolisian : pre-emptif, preventif , penegakan hukum khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi , radioaktif, perlawanan teror dan rehabilitasi terhadap kejadian force majeure.”

2. Tujuan

a. Tujuan Pasukan Gegana

Adapun tema pembangunan Pasukan Gegana Korbrimob adalah “Penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi dalam rangka mendukung stabilitas Kamtibmas guna mewujudkan peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” meliputi:

- 1) mewujudkan keamanan dalam menangani ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) mewujudkan Pasukan Gegana Korbrimob yang profesional, modern, berintegritas dan dipercaya masyarakat;
- 3) mewujudkan modernisasi sarana prasarana, Almatsus dan Alpalkam Pasukan Gegana Korbrimob;
- 4) menerapkan sistem manajemen Pasukan Gegana Korbrimob yang terintegrasi, transparan, akuntabel dan terpercaya.

b. Tujuan Satuan Bantuan Teknis

- 1) mewujudkan kehadiran negara dalam menangani ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) mewujudkan Satuan Bantuan Teknis yang profesional, modern, berintegritas dan dipercaya masyarakat;
- 3) meningkatkan sarana prasarana modern guna mendukung kelancaran tugas operasional Satuan Bantuan Teknis ;
- 4) menerapkan sistem manajemen Satuan Bantuan Teknis yang terintegrasi, transparan, akuntabel dan terpercaya.

3. Sasaran Prioritas

a. Sasaran Prioritas Pasukan Gegana.

Mengacu kepada tahapan capaian Renstra Pasukan Gegana Korbrimob Tahun 2020-2024, maka sebagai pentahapan kebijakan Tahun 2024 yaitu: “Melanjutkan dan memantapkan kualitas penggelaran kekuatan Pasukan Gegana Korbrimob secara responsif dan tuntas dengan sinergitas polisional kemitraan bersama pemangku kepentingan (Stakeholders) didukung inovasi yang produktif serta kesejahteraan personel Pasukan Gegana Korbrimob”, yaitu:

- 1) pertama: “Mengoptimalkan penggelaran kekuatan Pasukan Gegana Korbrimob secara cepat, tepat dan tuntas guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi dalam rangka pemantapan kinerja Harkamtibmas yang kondusif;”
- 2) kedua: “Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan sumber daya manusia Pasukan Gegana Korbrimob dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda melalui pendidikan dan latihan;”
- 3) ketiga: “Mengoptimalkan pemenuhan sarana prasarana, Almatsus dan Alpalkam Pasukan Gegana Korbrimob yang semakin berkualitas dan modern secara bertahap dan berkelanjutan;”
- 4) keempat: “Mewujudkan sistem manajemen kinerja dalam rangka mendukung penyelenggaraan tata kelola organisasi secara integral dengan baik dan maksimal;”
- 5) kelima: “Memantapkan pengawasan dan pengendalian SDM Pasukan Gegana Korbrimob sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku secara efektif guna meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas Pasukan Gegana Korbrimob”.

b. Sasaran Prioritas Satuan Bantuan Teknis

Mengacu kepada tahapan capaian Renstra Satuan Bantuan Teknis tahun 2020-2024, maka sebagai pentahapan kebijakan tahun 2024 yaitu: **“Memantapkan penggelaran kekuatan Satuan Bantuan Teknis dengan responsif dan tuntas secara efektif dan efisien didukung Almatsus yang berkualitas, modern, sumber daya manusia yang produktif, unggul serta profesional”**, yaitu :

- 1) **Pertama** : “Penggelaran kekuatan Satuan Bantuan Teknis dengan responsif dan tuntas guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi dalam rangka terpeliharanya Kamtibmas yang kondusif;”
- 2) **Kedua** : “Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan sumber daya manusia Satuan Bantuan Teknis dan satuan jajaran maupun Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda melalui pendidikan dan latihan;”

- 3) **Ketiga** : “Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana, Almatsus dan Alpalkam Satuan Bantuan Teknis yang semakin berkualitas dan modern secara bertahap dan berkelanjutan”;
- 4) **Keempat** : “Meningkatkan sistem manajemen kinerja dalam rangka mendukung penyelenggaraan tata kelola organisasi secara integral dengan baik dan maksimal”;
- 5) **Kelima** : “Pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia Satuan Bantuan Teknis sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku secara efektif untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas”.

III. Arah Kebijakan dan Strategi

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pasukan Gegana.

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran Prioritas Pasukan Gegana Korbrimob Tahun 2024, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Memantapkan penggelaran kekuatan Pasukan Gegana Korbrimob secara cepat, tepat dan tuntas guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi untuk menciptakan Harkamtibmas kondusif”**, yaitu :

- 1) pemantapan penggelaran kekuatan Pasukan Gegana Korbrimob dalam rangka pengamanan tahapan Pemilu 2024 dan pengamanan event nasional maupun internasional sebagai penindakan gangguan kamtibmas khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif dan perlawanan teror;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

- a) menempatkan personel subden Siaga di barak siaga Pasukan Gegana Korbrimob yang on call 1 X 24 Jam untuk mempercepat pergerakan pasukan.

(giat5087/prog2/SP1/SS2/IKU2, PPK Prog5, giat12, 30, renaksi 48,117);
 - b) menyiapkan Almatsus, Alpalkam, sarana dan prasarana siap operasional dalam rangka penggelaran kekuatan satuan jajaran Pasukan Gegana Korbrimob dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda dengan cepat, tepat dan tuntas;

(giat5087/prog4/SP1/SP2/SS1/IKU1, SS2/IKU2 ,PPK Prog 5,10 giat 16,33,34 renaksi 61,62,63,64,64);
 - c) meningkatkan peran Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda sebagai penanggap pertama dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi (kontinjensi);

(giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1,SS2/IKU2, PPK prog6,11, giat23, renaksi86);
 - d) meningkatkan sinergitas proaktif dan kerjasama dengan satuan kewilayahan dalam pelaksanaan tugas dilapangan dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi maupun dalam penanganan pandemi Covid 19;

(giat5087/prog12/SP1/SS3/IKU4/Prom9, PPK prog6,11, giat23, renaksi84);
 - e) melakukan analisa dan evaluasi setiap selesai pelaksanaan tugas guna penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya.

(giat5087/prog3/SP1/SS-/IKU-/Prom10, PPK prog15, giat48, renaksi168);
- 2) meningkatkan sinergitas polisional kemitraan dengan Satuan Kewilayahan dan Satuan Fungsi Kepolisian lainnya maupun pemangku kepentingan (stakeholder) yang produktif para

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

- a) pemetaan standar kompetensi personel dalam bidang pembinaan maupun operasional sebagai upaya peningkatan karier; (giat5087 /prog1/ SP3/SS1/ IKU1, SS3/IKU4);
 - b) pemetaan personel yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan pengembangan umum dan khusus di dalam maupun di luar negeri; (giat5087/ prog1 /SP3/ SS3/IKU4);
 - c) mengikutsertakan personel Pasukan Gegana Korbrimob dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda dalam pelatihan dan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain
 - d) di dalam maupun diluar negeri guna meningkatkan profesionalisme; (giat5087/ prog1/SP3 / IKU3, IKU3, IKU4);
 - e) pengajuan penambahan jumlah kuota peserta Dikbangspes dan Dikbangum Polri untuk personel Pasukan Gegana Korbrimob dan satuan jajaran.
- 2) terpeliharanya kemampuan personel Pasukan Gegana Korbrimob dan satuan jajaran maupun Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda melalui latihan pemeliharaan kemampuan yang terprogram dan terencana;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pemetaan kemampuan dan keterampilan personel Pasukan Gegana Korbrimob dan Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda sebagai data awal dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang handal dan profesional; (giat5087/prog1/SP3/SS3/IKU3, IKU4, IKU5);
- b) pemetaan dan pemeriksaan standar fisik, mental dan kesehatan sumber daya manusia berkaitan dengan Postur Pasukan Gegana Korbrimob; (giat5087/ prog1/SP3/ SS3/ IKU3, IKU4, IKU5);

- c) penyusunan standar pelatihan manajerial mulai tingkat Unit, Subden, Detasemen dan Satuan;(giat5087/ prog1/ SP3/SS3/ IKU3);
 - d) mengajukan penambahan alokasi anggaran untuk latihan pemeliharaan kemampuan bagi personel Pasukan Gegana Korbrimob dan satuan jajaran; (giat5087/ prog1/SP3/ SS4/ IKU3, IKU4);
 - e) mengikutsertakan personel Pasukan Gegana Korbrimob dan Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda dalam pelatihan dan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain di dalam maupun luar negeri guna meningkatkan profesionalisme; (giat5087/ prog1/SP3 /IKU3, IKU3, IKU4);
- 3) penambahan jumlah personel Pasukan Gegana Korbrimob sehingga dapat memenuhi jumlah Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP);
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
- a) menginventarisir kebutuhan personel sesuai dengan kepangkatan maupun keilmuan berdasarkan kebutuhan dan tantangan tugas yang dihadapi;(giat3084/prog1, prog 3, SP3/SS3/IKU3, SS4/IKU6);
 - b) mengajukan penambahan personel dan peralatan secara bertahap dalam rangka pemenuhan DSPP Pasukan Gegana Korbrimob dan satuan jajaran;(giat3084/prog3, SP3, SS3/IKU3/SS4/IKU6);
 - c) rasionalisasi dan penataan personel Pasukan Gegana Korbrimob berdasarkan penambahan personel dari Korbrimob Polri;(giat3084/prog3, SP3, SS3/IKU3/SS4/IKU6);
 - d) menyusun piranti lunak mengenai Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP) di Pasukan Gegana Korbrimob maupun di Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda;(giat3084/prog3, SP3, SS3/IKU3/SS4/IKU6);
- 4) melakukan pendataan dan pengajuan sertifikasi kemampuan teknis personel Pasukan Gegana Korbrimob dan Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

- a) melaksanakan pemetaan kemampuan yang dimiliki personel Pasukan Gegana Korbrimob, satuan jajaran dan Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda; (giat5087/ prog1 /SP3/ SS4/ IKU3, IKU4);
 - b) mengikutsertakan personel Pasukan Gegana Korbrimob dan Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi kemampuan Gegana di LSP Polri; (giat5087/ prog1/ SP3/ SS4/IKU3, IKU4);
 - c) menginput ke database kemampuan khusus yang dimiliki personel Pasukan Gegana Korbrimob dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda secara berkala;(giat5087/ prog1/ SP3/ SS4/IKU4);
- 5) peningkatan sistem manajemen karir Pasukan Gegana Korbrimob berbasis kinerja;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) pemetaan kompetensi berdasarkan keilmuan dan keahlian / pendidikan;(giat5087/prog4/SP2/SS3/IKU7, IKU10);
- b) optimalisasi emansipasi Polwan melalui jabatan staf maupun pasukan seperti Kasi, Kasubsi, Paur, Pamin maupu Danunit; (giat5087/ prog4/ SP2/ SS3/ IKU7, IKU10);
- c) memberikan kesempatan penugasan operasi Kepolisian dan tugas kepolisian di daerah konflik bagi Polwan; (giat5087/ prog4/ SP2/ SS3 /IKU7, IKU10);
- d) melaksanakan penerapan terhadap penilaian 13 komponen Polri secara komprehensif meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka mendukung peningkatan karir personel Pasukan Gegana Korbrimob secara objektif; (giat5087/ prog4/ SP2/ SS3/IKU7, IKU10);
- e) melaksanakan pengisian data ke dalam sistem manajemen karir kinerja secara daring dengan SIPP; (giat5087/ prog4/ SP2/ SS3/ IKU7, IKU10);

- f) penugasan personel dalam setiap agenda kegiatan pengiriman Kontingen Pasukan PBB di seluruh Dunia berkaitan dengan perdamaian Dunia dalam bidang kemanusiaan, kesehatan dan pendidikan; (giat5087/ prog4/ SP2/ SS3/ IKU10);
- c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana, Almatsus dan Alpalkam Pasukan Gegana Korbrimob dan Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda yang semakin berkualitas dan modern secara bertahap dan berkelanjutan”, yaitu :
- 1) membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagai penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
- a) melakukan pendataan terhadap sarana prasarana, Almatsus dan Alpalkam yang dimiliki Pasukan Gegana Korbrimob dan satuan jajaran; (giat5059/prog3/SP4/SS4/IKU6);
- b) menyusun dan mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan skala prioritas;
(giat5059/prog4/SP3, SP4/SS3, SS4/IKU7, IKU11);
- c) mengajukan anggaran biaya pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana, Almatsus dan Alpalkam Pasukan Gegana Korbrimob untuk mendukung kesiapan operasional satuan maupun menambah usia pakai; (giat5059/prog3/SP4/SS2/IKU2, SS4/IKU6);
- d) mengoptimalkan sarana prasarana, Almatsus dan Alpalkam yang dimiliki Pasukan Gegana Korbrimob dalam pelaksanaan tugas menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi;
(giat5059/prog3/SP4/SS1/IKU1, SS4/IKU6);
- e) penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui unit layanan pengadaan (ULP);
(giat5059/prog5/SP4/SS5/IKU7/IKU8);

- 2) meningkatkan pemenuhan Almatsus dan Alpalkam Pasukan Gegana Korbrimob dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda yang semakin berkualitas, modern, berbasis teknologi dan informasi ;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
- a) menyusun road map dan mapping rencana kebutuhan Almatsus dan Alpalkam Pasukan Gegana Korbrimob, Satuan Jajaran dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda berdasarkan tantangan tugas ke depan;
(giat3084/prog3/SP4/SS4/IKU6);
 - b) menginventarisir kebutuhan pemenuhan Almatsus dan Alpalkam untuk Pasukan Gegana Korbrimob dan satuan jajaran maupun Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda;
(giat5059/prog2/SP3/SS4/IKU12);
 - c) mengajukan penambahan dan upgrade Almatsus dan Alpalkam Pasukan Gegana Korbrimob, Satuan Jajaran dan Detasemen Gegana Satbrimob Polda sesuai perkembangan teknologi dan termmodern sehingga dapat mendukung penggelaran operasional Pasukan Gegana Korbrimob;
(giat3084/prog3/SP4/SS4/IKU6);
 - d) penyusunan dan pengajuan kebutuhan Almatsus dan Alpalkam yang sangat diperlukan (skala prioritas) berdasar spesifikasi teknis secara bottom up;
(giat3084/prog3/SP4/SS4/IKU6);
 - e) menetapkan standarisasi Almatsus dan Alpalkam Pasukan Gegana Korbrimob sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tugas ke depan;
(giat5059/prog3/SP4/SS4/IKU6);
 - f) melakukan anev terhadap katalog Alpalkam dan Almatsus Pasukan Gegana Korbrimob dan satuan jajaran;
(giat5059/prog2/SP3/SS4/IKU12);
- d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Meningkatkan sistem manajemen kinerja dalam rangka mendukung penyelenggaraan tata kelola organisasi secara integral dengan baik dan maksimal”, yaitu :

- 1) penguatan organisasi Pasukan Gegana Korbrimob yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel ;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pasukan Gegana Korbrimob yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melakukan perbaikan, pengembangan dan peningkatan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan guna pencapaian hasil yang optimal;(giat5087/prog5/SP5/SS3/IKU3)
 - b) perbaikan dan penyempurnaan peraturan tentang SOTK di Pasukan Gegana Korbrimob dan Detasemen Gegana satuan Brimob Polda ;(giat5087/prog5/ SP5/SS3/IKU3);
 - c) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pasukan Gegana Korbrimob. (giat0002 /prog4/SP3, SP5/SS3, SS5/IKU10);
 - d) memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi tentang Pasukan Gegana Korbrimob; (giat0002/ progHarkamtibmas/ SP4 /SS5 /IKU12/ ProgQuickWins, prog2,giat1, Indikator1);
- 2) penataan dan penguatan organisasi Pasukan Gegana Korbrimob yang efektif dan efisien;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pasukan Gegana Korbrimob yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melakukan perbaikan, pengembangan dan peningkatan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan guna pencapaian kinerja organisasi yang optimal;(giat0002/ progHarkamtibmas/ SP4/ SS5/ ProgQuickWins, prog2);
 - b) penataan struktur jabatan di Pasukan Gegana Korbrimob dan satuan jajaran;(giat0002/ prog4/SP2, SP4/ SS3, SS5/ IKU10);
 - c) mengikutkan sertakan assessment jabatan di lingkungan Korps Brimob Polri bagi Personel Pasukan Gegana Korbrimob dan satuan jajaran yang telah memenuhi syarat; (giat5087/ prog4/ SP2, SP4/SS3/ IKU7, IKU10);
- 3) peningkatan sistem manajemen kinerja Pasukan Gegana Korbrimob;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pasukan Gegana Korbrimob yang akan dilakukan yaitu:

- a) monitoring dan evaluasi sistem manajemen kinerja Pasukan Gegana Korbrimob ;(giat5087/prog5/SP5/SS5/IKU7);
 - b) penyiapan sistem dan instrumen serta penyampaian laporan kinerja Pasukan Gegana Korbrimob sesuai ketentuan yang berlaku. (giat5087/prog5/SP5/SS5/IKU7);
 - c) penempatan personel Pasukan Gegana Korbrimob sesuai kompetensi, keilmuan dan bidangnya;(giat5087/ prog5/ SP5/ SS3 / IKU3);
 - d) meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran Satker secara efektif dan efisien; (giat4339 /progHarkamtibmas/SP4 /SS5/IKU13 ,IKU15/ ProgQuickWins, prog2);
 - e) meningkatkan sinergitas dalam menyusun produk perencanaan Pasukan Gegana Korbrimob dalam rangka mendukung perencanaan Korps Brimob Polri yang semakin berkualitas; (giat3068/ progHarkamtibmas /SP4/SS5/ IKU13, IKU15/ ProgQuickWins, prog2);
 - f) melaksanakan sistem manajemen analisa beban kerja personel Pasukan Gegana Korbrimob secara terintegrasi; (giat5053/ progHarkamtibmas /SP4/SS5 /IKU13, IKU15/ ProgQuick Wins,prog2);
- 4) penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran Pasukan Gegana Korbrimob yang akuntabel;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
- a) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran di Pasukan Gegana Korbrimob; (giat5087/ prog5/SP5 /SS5/IKU8);
 - b) meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan proporsionalitas keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan keuangan Negara; (giat5087/ prog5/SP5/SS5 /IKU8);
 - c) meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran satuan; (giat5087/ prog5/ SP5/SS5 /IKU8/ PPK15/ GIAT48/ Renaksi168);

- d) monev sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Satker Pas Gegana Korbrimob; (giat5087/ prog5/ SP5/ SS5/ IKU7/ IKU8);
- 5) peningkatan nilai-nilai budaya Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
- a) melaksanakan revolusi mental bagi personel Pasukan Gegana Korbrimob untuk mewujudkan profesionalisme; (giat5087/ prog1/ SP5/ SS3/IKU3);
- b) mewujudkan sosok pemimpin yang integrated, solutif dan inovatif mulai dari komandan unit sampai dengan komandan satuan;(giat5087/ prog1/SP5/ SS3 /IKU5);
- c) meningkatkan pembinaan rohani dan mental bagi personel Pasukan Gegana Korbrimob secara terencana dan terprogram.(giat5087 /prog1 /SP5 /SS3 /IKU5);
- 6) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pasukan Gegana Korbrimob ;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
- a) melanjutkan pembangunan zona integritas di Pasukan Gegana Korbrimob menuju WBK dan WBBM; (giat5053/prog1 /SP5/SS3 /IKU5/PPK11 /Giat39 /Renaksi140);
- b) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih, bebas KKN, berdaya (capable), dan melayani di Pasukan Gegana Korbrimob.(giat5053 /prog1/ SP5/ SS3/IKU5/ PPK11 /Giat39 /Renaksi140);
- e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Mengoptimalkan Pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia Pasukan Gegana Korbrimob sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku secara efektif untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas”, yaitu:
- 1) meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pengendalian personel Pasukan Gegana Korbrimob;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

- a) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap personel Pasukan Gegana Korbrimob secara efektif, efisien dan berkelanjutan;(giat5087/ prog5/SP5/ SS3, SS5 /IKU5);
 - b) mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengawasan dan pengendalian personel Pasukan Gegana Korbrimob . (giat5087 /prog5 /SP5/SS3, SS 5/IKU5).
- 2) menerapkan hukum Kepolisian di Pasukan Gegana Korbrimob dalam rangka mendukung hukum Kepolisian sebagai elemen Program Legislasi Nasional bidang Kepolisian serta memfungsikan sebagai pusat informasi bagi pelaksana tugas Polri di lapangan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
- a) menyusun, mengusulkan dan memperkuat kerangka regulasi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Pasukan Gegana Korbrimob ; (giat5087/ prog5/ SP5/ SS5/ IKU5);
 - b) monitoring dan evaluasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pasukan Gegana Korbrimob. (giat5087/prog5/SP5/SS5/IKU5);

2. Arah Kebijakan dan Strategi Satuan Bantuan Teknis.

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran Prioritas Satuan Bantuan Teknis Tahun 2024, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Penggelaran kekuatan Satuan Bantuan Teknis dengan responsif dan tuntas guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi dalam rangka terpeliharanya Kamtibmas yang kondusif”**, yaitu :
 - 1) menyiapkan penggelaran kekuatan Satuan Bantuan Teknis guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan Kimia, Biologi, Radioaktif, perlawanan terror serta pemberian bantuan teknis fungsi Gegana pada kegiatan yang berskala nasional maupun internasional;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

- a) menyiapkan personel satuan jajaran Satuan Bantuan Teknis guna terlaksananya tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan Kimia, Biologi, Radioaktif, perlawanan terror dengan baik, aman dan lancar serta pemberian bantuan teknis fungsi Gegana pada kegiatan yang berskala nasional maupun internasional; (giat 5087/ prog 4/ SP 1/ SP 2/ SS 1/ IKU 1, SS 2/ IKU 2, PPK Prog 5,10 giat 16,33,34 renaksi 61,62,63,64,64);
- b) menyiapkan Almatsus, Alpalkam, sarana dan prasarana siap operasional dalam rangka penggelaran kekuatan Satuan Bantuan Teknis; (giat 5087/ prog 4/ SP 1/ SP 2/ SS 1/ IKU 1, SS2/IKU2,PPKrog 5,10/giat16,33,34renaksi 61,62,63,64,64);
- c) menjalin kerjasama dan sinergitas dengan satuan/instansi lain sebagai pertimbangan dalam penentuan cara bertindak dan atau penentuan SOP pelaksanaan tugas dilapangan. (giat 5087/ prog 12/ SP1/ SS3/ IKU4/ Prom9, PPKProg 15, giat 94, Renaksi 170, 173);
- d) meningkatkan kerjasama proaktif dengan satuan /instansi lain dalam bentuk latihan bersama guna penyamaan persepsi dalam penanganan kasus bom, terorisme dan KBR maupun dalam penanganan pandemi Covid 19; (giat 5087/ prog 12/ SP 1/ SS 3/ IKU 4/ Prom 9, PPK Prog 15, giat 94, Renaksi 170, 173);
- e) membentuk jaringan komunikasi dan koordinasi dengan personel Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda dalam penanganan kasus bom, KBR dan terror yang terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia; (giat 5087/ prog 12/ SP 1/SS 3/ IKU 4/ Prom 9, PPK Prog 15, giat 48, Renaksi 168, 169);

- 2) penggelaran kekuatan Satuan Bantuan Teknis untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
- a) mengoptimalkan penggunaan barak siaga Satuan Bantuan Teknis bagi Subden siaga untuk memudahkan dan mempercepat pergerakan pasukan.
(giat 5087/ prog2/ SP1/ SS2/ IKU2 ,PPK Prog5, 9, giat12, 30, renaksi48,117);
 - b) penugasan personel satuan jajaran Satuan Bantuan Teknis dilengkapi dengan Almatsus, Alpalkam dan sarana prasarana pendukung lainnya untuk tergelarnya operasional Satuan Bantuan Teknis sesuai dengan kebutuhan di lapangan sehingga dapat menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi secara responsif dan tuntas;
(giat 5087/ prog 4/ SP 1, SP 2/ SS 1/ IKU 1, SS 2/ IKU 2,PPK prog4,11 ,giat 9, 10, 37, 40, renaksi 34, 37, 38135, 144);
 - c) mengoptimalkan kekuatan Satuan Bantuan Teknis untuk digerakkan secara cepat menuju lokasi kejadian didukung sarana angkut dengan mobilitas cepat.
(giat 3084/ prog 4/ SP 1, SP/ SS 1/ IKU 1, SS 2/ IKU 2, PPK prog 6,11, Giat 23, renaksi 88);
 - d) meningkatkan peran Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda sebagai penanggap pertama dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi kontinjensi;
(giat 5087/ prog 4/ SP 1/ SS 1/ IKU 1, SS 2/ IKU 2, PPK prog 6, 11 Giat 23, renaksi 86);
 - e) meningkatkan sinergitas proaktif dan kerjasama dengan satuan kewilayahan terkait pelaksanaan tugas dilapangan dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban

masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi serta penanganan pandemi Covid 19;

(giat 5087/ prog 12/ SP 1/ SS 3/ IKU 4/ Prom 9, PPK prog 6, 11, giat 23, renaksi 84);

- f) melakukan analisa dan evaluasi setiap selesai pelaksanaan tugas guna penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya.
(giat 5087/ prog 3/ SP 1/ SS-/ IKU-/ Prom 10, PPK prog 15, giat 48, renaksi 168);

b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan sumber daya manusia Satuan Bantuan Teknis melalui pendidikan dan latihan”**, yaitu :

- 1) peningkatan kompetensi dan kesejahteraan SDM Satuan Bantuan Teknis melalui pendidikan ;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
- a) pemetaan standar kompetensi yang dimiliki setiap personel dalam bidang pembinaan dan operasional untuk peningkatan karier ;
(giat 5087/ prog 1/ SP 3/ SS 1/ IKU 1,SS 3/ IKU 4);
- b) pemetaan personel yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan pengembangan umum dan khusus di dalam maupun di luar negeri;
(giat 5087/ prog 1/ SP 3/ SS 3/ IKU 4);
- c) mengikutsertakan personel dalam misi perdamaian Dunia dan kemanusiaan yang tergabung dalam Kontingen PBB.
(giat 5087/ prog 1/ SP 3/ SS 3/ IKU 4);
- 2) terpeliharanya kemampuan personel Satuan Bantuan Teknis melalui latihan pemeliharaan kemampuan yang terprogram dan terencana;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

- a) pemetaan kemampuan dan keterampilan personel Satuan Bantuan Teknis sebagai data awal dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional; (giat 5087/ prog 1/SP3/SS3/ KU3,IKU 4, IKU 5);
 - b) pemetaan dan pemeriksaan standar fisik, mental dan kesehatan sumber daya manusia berkaitan dengan Postur Satuan Bantuan Teknis;(giat5087/prog1/SP3/SS3/IKU3, IKU4,IKU5);
 - c) penyusunan standar pelatihan manajerial mulai tingkat Unit, Subden dan Detasemen;(giat 5087/ prog1/ SP 3/SS3/IKU 3);
 - d) mengajukan penambahan alokasi anggaran untuk latihan pemeliharaan kemampuan bagi personel Satuan Bantuan Teknis;(giat 5087/ prog 1/ SP 3/ SS 4/ IKU 3, IKU 4);
- 3) penambahan jumlah personel Satuan Bantuan Teknis sehingga dapat memenuhi jumlah Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP);
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
- a) menginventarisir kebutuhan personel sesuai dengan kepangkatan maupun keilmuan berdasarkan kebutuhan dan tantangan tugas yang dihadapi ; (giat 3084/ prog 1, prog 3, SP 3 / SS 3/ IKU 3, SS 4/ IKU 6);
 - b) mengajukan penambahan personel dan peralatan secara bertahap dalam rangka pemenuhan DSPP Satuan Bantuan Teknis ; (giat 3084/ prog 3, SP 3, SS 3/ IKU 3/ SS 4/ IKU 6);
 - c) menyusun dan mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan; (giat 3084/ prog 3, SP 3, SS 3/ IKU 3/ SS 4/ IKU 6);
 - d) menyusun piranti lunak mengenai Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP); (giat 3084/ prog 3, SP 3, SS 3/ IKU 3/ SS 4/ IKU 6);
- 4) melakukan pendataan dan pengajuan sertifikasi kemampuan teknis personel Satuan Bantuan Teknis;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

- a) melaksanakan pemetaan kemampuan yang dimiliki personel Satuan Bantuan Teknis;
(giat 5087/ prog 1/ SP 3/ SS 4/ IKU 3, IKU 4);
 - b) mengikutsertakan personel Satuan Bantuan Teknis yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi kemampuan Gegana di LSP Polri;
(giat 5087/ prog 1/ SP 3/ SS 4/ IKU 3, IKU 4);
 - c) menginput ke *database* kemampuan yang dimiliki personel Satuan Bantuan Teknis;
(giat 5087/ prog 1/ SP 3/ SS 4/ IKU 4);
- 5) peningkatan kualitas kemampuan personel Satuan Bantuan Teknis;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

- a) penyusunan standar latihan kemampuan manajerial tingkat perorangan, unit, Subden, Detasemen dan satuan;
(giat 5087/ prog 1/ SP 3/ SS 3/ IKU 4);
 - b) mengikutsertakan personel Satuan Bantuan Teknis dalam pelatihan dan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain di dalam maupun luar negeri guna meningkatkan profesionalisme;
(giat 5087/ prog 1 /SP 3 / IKU 3, IKU 3, IKU 4);
- c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatan pemenuhan sarana prasarana, Almatsus dan Alpalkam Satuan Bantuan Teknis yang semakin berkualitas dan modern secara bertahap dan berkelanjutan”**, yaitu :
- 1) membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi dalam rangka menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar

tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan Kimia, Biologi, Radioaktif, perlawanan terror;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

- a) melakukan pendataan sarana prasarana, Almatsus dan Alpalkam yang dimiliki Satuan Bantuan Teknis;
(giat 5059/ prog 3/ SP 4/ SS 4/ IKU 6);
 - b) mengajukan penambahan anggaran biaya pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana, Almatsus dan Alpalkam Satuan Bantuan Teknis untuk mendukung kesiapan operasional satuan maupun menambah usia pakai;
(giat 5059/ prog 3/ SP 4 /SS 2/ IKU 2, SS 4/ IKU 6);
 - c) mengoptimalkan sarana prasarana, Almatsus dan Alpalkam yang dimiliki Satuan Bantuan Teknis dalam pelaksanaan tugas menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi;
(giat 5059/ prog 3/ SP 4/ SS 1/ IKU 1, SS 4/ IKU 6);
 - d) penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan PERPRES No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas *Peraturan Presiden* Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Pengadaan Barang/Jasa* Pemerintah melalui unit layanan pengadaan (ULP) ;
(giat 5059/ prog 5/ SP 4/SS 5/ IKU 7/ IKU 8);
- 2) meningkatkan pemenuhan Almatsus dan Alpalkam Satuan Bantuan Teknis yang semakin berkualitas , modern , berbasis teknologi dan informasi ;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

- a) menyusun road map dan mapping rencana kebutuhan Almatsus dan Alpalkam Satuan Bantuan Teknis berdasarkan tantangan tugas ke depan;
(giat 3084/ prog 3/ SP 4/ SS 4/ IKU 6);
 - b) mengajukan penambahan dan upgrade Almatsus dan Alpalkam Satuan Bantuan Teknis sesuai perkembangan teknologi dan termodern ;
(giat 3084/ prog 3/ SP 4/ SS 4/ IKU 6);
 - c) penyusunan dan pengajuan kebutuhan Almatsus dan Alpalkam yang sangat diperlukan (skala prioritas) berdasarkan spesifikasi teknis secara bottom up;
(giat 3084/ prog 3/ SP 4/ SS 4/ IKU 6);
 - d) menetapkan standarisasi Almatsus dan Alpalkam Satuan Bantuan Teknis sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tugas ke depan; (giat 5059/ prog 3/ SP 4/ SS 4/ IKU 6);
- d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan sistem manajemen kinerja dalam rangka mendukung penyelenggaraan tata kelola organisasi secara integral dengan baik dan maksimal”**, yaitu :
- 1) penataan dan penguatan organisasi Satuan Bantuan Teknis yang efektif dan efisien;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Satuan Bantuan Teknis yang akan dilakukan yaitu :
 - a) melakukan perbaikan, pengembangan dan peningkatan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan guna pencapaian hasil yang optimal; (giat 5087/ prog 5/ SP 5/ SS 3/ IKU 3)
 - b) perbaikan dan penyempurnaan peraturan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan di Satuan Bantuan Teknis; (giat 5087/ prog 5/ SP 5/ SS 3/ IKU 3);
 - c) Reformasi Birokrasi di Satuan Bantuan Teknis.
(giat 0002/ prog 4/ SP 3, SP 5/ SS 3, SS 5/ IKU 10);

- 2) peningkatan sistem manajemen kinerja Satuan Bantuan Teknis; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Satuan Bantuan Teknis yang akan dilakukan yaitu :
- a) monitoring dan evaluasi sistem manajemen kinerja Satuan Bantuan Teknis ;(giat 5087/ prog 5/ SP 5/ SS 5/ IKU 7);
 - b) penyiapan sistem dan instrumen serta penyampaian laporan kinerja Satuan Bantuan Teknis sesuai ketentuan yang berlaku.(giat 5087/ prog 5/ SP 5/ SS 5/ IKU 7);
 - c) penempatan personel Satuan Bantuan Teknis sesuai kompetensi, keilmuan dan bidangnya; (giat 5087/ prog 5/ SP 5/ SS 3 / IKU 3);
- 3) penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran Satuan Bantuan Teknis yang akuntabel;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
- a) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran di Satuan Bantuan Teknis ;(giat 5087/prog 5/SP 5/SS5/IKU 8);
 - b) meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan proporsionalitas keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan keuangan Negara; (giat 5087/ prog 5/ SP 5/ SS 5/ IKU 8);
 - c) meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran satuan;(giat 5087/ prog 5/ SP 5/ SS 5/ IKU 8/ PPK 15/ GIAT 48/ Renaksi 168);
 - d) monitoring dan evaluasi sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian maupun pelaporan Satuan kerja Satuan Bantuan Teknis ; (giat 5087/ prog 5/ SP 5/ SS 5/ IKU 7/ IKU 8);

- 4) peningkatan nilai-nilai budaya Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
 - a) melaksanakan revolusi mental bagi personel Satuan Bantuan Teknis untuk mewujudkan profesionalisme;
(giat 5087/ prog 1/ SP 5/ SS 3/ IKU 3);
 - b) mewujudkan sosok pemimpin yang berintegritas, solutif dan inovatif mulai dari komandan unit sampai dengan komandan satuan; (giat 5087/ prog 1/ SP 5/ SS 3/ IKU 5);
 - c) meningkatkan pembinaan rohani dan mental bagi personel Satuan Bantuan Teknis secara terencana dan terprogram.
(giat 5087/ prog 1/ SP 5/ SS 3/ IKU 5);

- 5) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Satuan Bantuan Teknis ;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
 - a) melanjutkan pembangunan zona integritas di Satuan Bantuan Teknis menuju WBK dan WBBM;
(giat 5053/ prog 1/ SP 5/ SS 3/ IKU 5/ PPK 11/ Giat 39/ Renaksi 140);
 - b) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih, bebas KKN, berdaya (*capable*), dan melayani di Satuan Bantuan Teknis.
(giat 5053/ prog 1/ SP 5/ SS 3/ IKU 5/ PPK 11/ Giat 39/ Renaksi 140);

- e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia Satuan Bantuan Teknis sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku secara efektif untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas”**, yaitu :
 - 1) mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pengendalian personel Satuan Bantuan Teknis ;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

- a) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap personel Satuan Bantuan Teknis secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
(giat 5087/ prog 5/ SP 5/ SS 3/ IKU 5);
 - b) mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengawasan dan pengendalian personel Satuan Bantuan Teknis.
(giat 5087/ prog 5/ SP 5/ SS 3/ IKU 5);
- 2) menerapkan hukum Kepolisian di Satuan Bantuan Teknis dalam rangka mendukung hukum Kepolisian sebagai elemen Program Legislasi Nasional bidang Kepolisian serta memfungsikan sebagai pusat informasi bagi pelaksana tugas Polri di lapangan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
- a) menyusun, mengusulkan dan memperkuat kerangka regulasi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Satuan Bantuan Teknis ;
(giat 5087/ prog 5/ SP 5/ SS 3/ IKU 5);
 - b) monitoring dan evaluasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Bantuan Teknis .
(giat 5087/ prog 5/ SP 5/ SS 3/ IKU 5).

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Satuan Bantuan Teknis T.A. 2024

1. Program dan Kegiatan Satuan Bantuan Teknis Pasukan Gegana

a. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri

1) Tujuan

Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas.

2) Kegiatan

a) Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras terdiri dari:

- (a) Perawatan gedung negara yakni:
 - Gedung Mako Satbantek (3 Lantai) dengan luas 1.350 M2;
- (b) Pemeliharaan Rantis 7 unit;
- (c) Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4, 15 Unit;
- (d) Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2, 41 unit;
- (e) Pemeliharaan peralatan kantor yakni :
 - (1) Pemeliharaan personal computer/ Laptop 15 Unit;
 - (2) Pemeliharaan Printer 15 Unit;
 - (3) Pemeliharaan AC 19 Unit.
 - (4) Pemeliharaan Genset 50 KVA 1 Unit.
- (f) Pemeliharaan peralatan fungsional yakni :
 - (1) Pemeliharaan Alat Infiltrasi Laut terdiri dari :
 - Perahu Karet 2 Unit;
 - Tabung selam 12 Unit;
 - Weight belt 10 Unit;
 - Kompresor Tabung Selam 2 Unit
 - Masker Selam 10 unit
 - Regulator Set 10 Unit
 - Snorkle 10
 - BCD 11 Unit
 - Senter Sorot Selam 10 unit
 - Motor Tempel 2 Unit
 - (2) Pemeliharaan Senjata api terdiri dari :
 - Senpi Genggam Pistol 149 Pucuk
 - Senpi Sniper 15 Pucuk
 - Senpi Panjang 125 Pucuk
 - (3) Pemeliharaan Alat Infiltrasi Udara terdiri dari :
 - Payung terjun 100 Set

- (4) Pemeliharaan TOC:
 - Perbaiki server dan perangkatnya 28 Unit
- (5) Jasa Layanan Internet Server
 - Jasa Internet 12 bulan

b) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1) Tujuan

Menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berintensitas tinggi, kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak.

2) Kegiatan

a) Dukungan teknis manajemen penanggulangan keamanan dalam negeri meliputi :

- (1) Pembayaran gaji dan tunjangan.
- (2) Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor dengan rincian sebagai berikut :
 - (a) Langganan Air Minum
 - (b) Pengadaan Alat Rumah tangga
 - (c) Pengadaan Alat Tulis Kantor
 - (d) Pengadaan Barang Cetak
- (3) Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan dengan rincian sebagai berikut :
 - (a) Jasa Cleaning Service terdiri dari 5 orang petugas kebersihan
 - (b) Seragam Petugas Kebersihan 5 orang
 - (c) Honorarium SAI/ SAKPA/ SIMAK/ SIRENA/ Pengelola keuangan.

b) Penanggulangan Keamanan dalam Negeri

Dalam kegiatan ini hanya terdapat satu komponen yakni Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan yang meliputi:

- (1) Rapat Anev Satuan dan Dukungan Uang transport koordinasi dengan instansi lain
- (2) Sewa Mesin Fotocopy sebanyak 1 unit
- (3) Evaluasi/Laporan Kegiatan
- (4) Menyelenggarakan pengamanan Kepolisian
- (5) Penyusunan program dan rencana kerja/ teknis/ program
- (6) Kegiatan Pembinaan Nikah
- (7) Penyusunan Program, Anggaran, dan Rencana Kerja
- (8) Penyusunan RKA-K/L dan DIPA
- (9) Dukungan Operasional Satker
- (10) ULP non organik / jaga fungsi kegiatan penjagaan satuan berjumlah 365 hari
- (11) Latihan dan penyiapan personel penanggulangan keamanan dalam negeri terdiri dari :
 - (a) Pemeliharaan Kemampuan Cyber Security
 - (b) Pemeliharaan kemampuan Surveillance
 - (c) Pemeliharaan Kemampuan Analisis dan Investigasi Data
 - (d) Pemeliharaan Kemampuan Cyber Patrol
 - (e) Pemeliharaan Kemampuan Close Quarter Battle (CQB)
 - (f) Pemeliharaan Kemampuan Sharp Shooter
 - (g) Pemeliharaan Kemampuan Tactical Mobile Location
 - (h) Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
- (12) Pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh
- (13) Internet

2. Pagu Anggaran Satuan Bantuan Teknis Pasgegana T.A. 2024

Alokasi Pagu Anggaran Satuan Bantuan Teknis Pasgegana pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 18.446.380.000,- (delapan belas milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri sebesar Rp 761,851,000,- sebagai berikut:
 - 1) Pemeliharaan kendaraan khusus dengan alokasi anggaran Rp. 190.000.000,-
 - 2) Pemeliharaan kendaraan bermotor Roda 4/6/10 dengan alokasi anggaran Rp. 150.101.000,-
 - 3) Pemeliharaan kendaraan bermotor Roda 2 dengan alokasi anggaran Rp 30.750.000,-
 - 4) Pemeliharaan peralatan kantor dengan alokasi anggaran Rp. 35.500.000,-
 - 5) Pemeliharaan peralatan Fungsional dengan alokasi anggaran Rp. 216.900.000,-
 - 6) Langganan Jasa Internet dengan alokasi Anggaran Rp. 138.600.000,-
- b. Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi sebesar Rp 16.397.617.000,- digunakan untuk kegiatan :
 - 1) Dukungan Teknis Manajemen Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri dengan alokasi anggaran Rp. 15.895.567.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pembayaran gaji dan tunjangan dengan alokasi anggaran Rp. 15.600.842.000,-
 - b) Pengadaan peralatan/perengkapan kantor dengan alokasi anggaran 294.725.000,-
 - 2) Dukungan Operasional Pertahanan dan keamanan dengan alokasi anggaran Rp. 502.050.000,-

- a) Perawatan gedung negara dengan alokasi anggaran Rp. 187.910.000,-
 - b) Evaluasi/ Laporan kegiatan berupa penjilidan atau penggandaan dengan alokasi anggaran 10.000.000,-
 - c) Kegiatan akomodasi rapat fungsi perencanaan dengan Alokasi Anggaran Rp. 84.000.000,-
 - d) ULP Non organik/ jaga fungsi dengan alokasi anggaran Rp. 113.460.000,-
 - e) Honorarium Operator Aplikasi dan Penanggung jawab keuangan dengan Alokasi Rp. 113.460.000,-
- 3) Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri dengan alokasi anggaran Rp. 1.286.912.000,-
- a) Transport Koordinasi dengan instansi lain dengan alokasi anggaran Rp. 75.000.000,-
 - b) Sewa peralatan kantor berupa mesin foto copy dengan alokasi anggaran Rp. 36.000.000,-
 - c) Honor Petugas Kebersihan dan Seragam dengan Alokasi Anggaran Rp. 135.000.000,-
 - d) Menyelenggarakan pengamanan kepolisian berupa giat analisis terhadap ancaman dan penanganan kejahatan berintensitas tinggi dengan alokasi anggaran Rp. 273.204.000,-
 - e) Rapat penyusunan Anggaran dengan Alokasi Anggaran Rp. 71.250.000,-
 - f) Latihan dan penyiapan personel penanggulangan keamanan dalam negeri dengan alokasi anggaran Rp. 450.900.000,-
 - g) Pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh dengan alokasi anggaran Rp. 107.008.000,-
 - h) Langganan Jasa Internet dengan alokasi anggaran Rp. 48.000.000,-

3. Kegiatan Prioritas Pagu Anggaran T.A. 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALOKASI (RIBU RUPIAH)	KET
BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	Mendukung tugas pembinaan dan operasional polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas	Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana secara optimal :	80%	761.851	
5059	Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras	sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas	1. Gedung Negara 2. Kendaraan Bermotor R2/4/6/10 3. Pemeliharaan peralatan kantor 4. Peralatan Fungsional	1.350 M2 61 Unit 45 Unit 496 Unit	187.910 180.851 35.500 216.900	
BQ	Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari ancaman kejahatan berkadar dan berintensitas tinggi, kerusuhan massa, kejahatan	Pelaksanaan Layanan Perkantoran, Pembinaan dan Latihan	31 Kali	17.684.529	

		terorganisir bersenjata api, bahan peledak dan perlawanan teror				
002	Dukungan Manajemen pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat		1. Gaji dan Tunjangan 2. Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan kantor	190 Pers 190 Pers	15.600.842 294.725	
5087	Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri		Jumlah personel yang mengikuti latihan pemeliharaan kemampuan	140	1.286.912	

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Satuan Bantek T.A. 2024 disusun untuk dijadikan pedoman Kerja pada Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Kelapadua
pada tanggal : Agustus 2023

**KOMANDAN SATUAN BANTUAN TEKNIS
PASGEGANA**

Drs. DADANG RAHARDJA, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69060322